

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA

UNIT KERJA : PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN : 2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	228 Laporan	50	50	50	68	110 Hari	Triwulan I: -Persiapan dan identifikasi penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat di perwakilan Kalbar -Penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat di perwakilan Kalbar Triwulan II: -Penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat di perwakilan Kalbar Triwulan III: -Penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat di perwakilan Kalbar -	Tim Pemeriksaan Laporan Perwakilan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
								Triwulan IV: - Penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat di perwakilan Kalbar	
								- Evaluasi dan penyusunan laporan Penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat di perwakilan Kalbar	
	Jumlah laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI bersifat tematik dan selektif khusus Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan			Triwulan I: - Persiapan IAPS Ombudsman RI bersifat tematik dan selektif khusus Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik - Penyusunan jadwal kegiatan dan identifikasi IAPS Triwulan II: - Koordinasi awal dengan instansi tempat IAPS - Pelaksanaan IAPS Ombudsman RI bersifat tematik dan selektif khusus	Tim Pemeriksaan Laporan dan IAPS perwakilan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
								Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik Triwulan III:	
								- Pelaksanaan IAPS Ombudsman RI bersifat tematik dan selektif khusus Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik Triwulan IV: - Evaluasi Pelaksanaan IAPS - Penyusunan Laporan IAPS	
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Jumlah pemerintah daerah yang dinilai atas opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	15 Pemerintah Daerah			15 Pemerintah daerah			Triwulan I: - Persiapan pelaksanaan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik Triwulan II: - Penyusunan Jadwal pelaksanaan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di 15 Pemerintah Daerah	Tim Pencegahan Perwakilan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
								- Koordinasi awal dengan instansi penyelenggaraan pelayanan publik di 15 Pemerintah Daerah Triwulan III:	
								- Pelaksanaan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di 15 Pemerintah Daerah Triwulan IV: - Evaluasi dan penyusunan laporan hasil Pelaksanaan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di 15 Pemerintah Daerah	
Terwujudnya Pengelolaan Perlengkapan dan Kerumahtanggaan yang Berkualitas	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Bulan Desember 2026	Triwulan I: - Persiapan dan identifikasi layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor - Pelaksanaan layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor Triwulan II:	ASN Kantor Perwakilan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
								- Pelaksanaan layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor Triwulan III:	
								- Pelaksanaan layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor Triwulan IV:	
								- Pelaksanaan layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	
								- Evaluasi dan penyusunan laporan Pelaksanaan layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	

Kepala Perwakilan
Ombudsman Republik Indonesia
Provinsi Kalimantan Barat,

Tariyah